

ISU GENDER DALAM DUNIA PENDIDIKAN JEPANG



Oleh

Mochamad Zaenal Fanani	(122011333083)
Gusta Iman Mukti Wibawa	(122111333055)
Nurul Izzati Qoni'ah	(122011333070)
Ryfanda Yudha Pradana	(122011333009)
Gustina Mitri	(502310310059)
Mega Tridarmawati	(502310310060)

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2023

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang adalah salah satu negara maju di Asia. Sistem pendidikan yang diterapkan dapat membentuk karakter dasar yang cukup kuat. Pendidikan yang diberikan meliputi kedisiplinan dan kemandirian. Pendidikan pada dasarnya sangat penting untuk keberlangsungan suatu negara, dan kualitas pendidikan suatu negara akan menjadi salah satu faktor terpenting dalam kemajuan negara tersebut. Pendidikan sangat penting bagi setiap bangsa, jadi setiap orang harus mendapatkan pendidikan yang terbaik jika mereka ingin memiliki masa depan yang lebih baik.

Jepang awalnya merupakan sebuah negara yang mengutamakan dominasi laki-laki ketimbang perempuan. Hal ini tentu memberi sebuah ketimpangan gender yang ada pada dunia pendidikan. Di balik kualitas hidup rata-rata yang baik di Jepang, ada masalah sosial. Menurut *The Global Gender Gap Report* yang dirilis oleh *World Economic Forum* pada tahun 2017, Jepang berada di peringkat 114 dari 140 negara dalam indeks kesenjangan gender global. Ranking Jepang pada laporan indeks kesenjangan gender global yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) juga menunjukkan kurangnya partisipasi perempuan. Negara yang mencakup partisipasi ekonomi dan peluang, pemberdayaan politik, dan latihan. Diskriminasi mempengaruhi ketidaksetaraan gender terhadap wanita, yang merupakan bentuk kekerasan. Perempuan bisa mengambil pendidikan yang setara dengan laki-laki setelah Perang Dunia II. Para ahli pendidikan di Jepang semakin terdorong untuk mencari suatu bentuk pendidikan modern yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat saat itu dengan menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Restorasi Meiji lebih mengarah ke sistem modern. Oleh karena itu, pendidikan modern diumumkan setelah Perang Dunia Kedua dan berbasis pada sistem Amerika. Kesadaran pemimpin dan rakyat Jepang tentang pentingnya pendidikan, kala itu ada juga tokoh pendidikan yang hadir. Jepang, sebagai negara Asia pertama yang memulai proses modernisasi, telah berfokus pada peningkatan kecerdasan penduduknya. Adanya reformasi ini cukup membawa perubahan agar tidak menimbulkan diskriminasi. Adapun persetujuan penghapusan diskriminasi pada tahun 1985. Sejak akhir tahun 1980-an, penelitian tentang gender dalam pembelajaran sains di Jepang telah dilakukan,

terutama untuk menyelidiki perbedaan gender dalam pembelajaran sains. Hasilnya menunjukkan bahwa anak perempuan lebih cenderung untuk menarik diri dari pelajaran sains di sekolah menengah.

Survei terhadap buku pelajaran sains sekolah menunjukkan pada tahun 1985, hanya anak laki-laki yang menunjukkan contoh perilaku berbahaya dalam eksperimen, tetapi pada tahun 2015, anak perempuan juga menunjukkan perilaku berbahaya, sehingga membuat stereotip berkurang. Meskipun sudah ada survei yang cukup untuk mengukur kesadaran anak perempuan dan siswa, tidak banyak analisis kualitatif tentang bagaimana anak perempuan berperilaku di kelas sains dan berpartisipasi dalam eksperimen sejak survei. (Yumoto, 2004).

(Baker, 1998) dalam memeriksa literatur yang membahas masalah kesetaraan dalam pendidikan sains dan memberikan ringkasan menyeluruh tentang penelitian tentang kesetaraan gender dalam pendidikan sains. Perbedaan gender telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pendekatan telah dikembangkan di negara lain untuk mendorong keterlibatan anak perempuan dalam pendidikan sains di sekolah. Di Jepang, bagaimanapun, intervensi terbatas pada sekolah dan SSH untuk anak perempuan, dan hanya ada beberapa intervensi di kelas sains reguler di program pendidikan bersama.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, sejak sekolah menengah, perbedaan gender telah menjadi lebih jelas dalam hal afektif daripada kognitif sains. Pertama, anak laki-laki memiliki nilai literasi sains yang lebih tinggi daripada anak perempuan di PISA 2015. Melihat bagaimana perempuan dan minoritas berada dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam sistem pendidikan global, tidak hanya dengan berbagai penelitian yang telah mendefinisikan perbedaan gender dalam pendidikan, tetapi juga dengan berbagai strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang telah dikembangkan dan diterapkan. Namun, penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang isu-isu gender dan membahas kemungkinan studi masa depan di Jepang karena data serupa belum ditemukan di negara itu.

Jepang telah berubah menjadi negara modern, tetapi diikuti dengan kultur patriarkis yang tetap ada. Mayoritas orang masih percaya bahwa wanita harus didomestikasi, sementara suami bekerja di luar rumah, perempuan bertanggung jawab atas anak dan rumah. Perbedaan gender di Negeri Matahari Terbit sangat

rendah dibandingkan dengan negara ekonomi maju maupun berkembang. Diskriminasi pada bidang pendidikan masih tetap berlanjut. Hal ini seperti Universitas yang mencurangi skor ujian masuk agar kandidat laki-laki mendapatkan skor yang tinggi sementara kandidat perempuan mendapatkan skor yang rendah pada 2018. Pengaruh budaya patriarki yang masih kental yang membuat kesetaraan belum dapat diperoleh secara maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah ketidaksetaraan gender pada dunia pendidikan Jepang?
- b. Bagaimanakah dinamika kesetaraan gender dari tahun ke tahun dalam dunia pendidikan di Jepang

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, didapat tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis munculnya isu gender pada dunia pendidikan Jepang
- b. Untuk memaparkan sejauh manakah perubahan isu gender dalam dunia pendidikan Jepang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Keilmuan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta menjadi referensi
 - b Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian lain untuk menjelaskan tentang isu gender di Jepang

2. Kajian Pustaka

Penulisan makalah ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Penelitian-penelitian yang tersebut dijadikan sebagai sumber informasi serta sebagai perbandingan dengan makalah yang kami tulis ini. Penelitian yang kami temukan

berbentuk artikel jurnal dan laporan yang memiliki hubungan dengan makalah yang kami buat.

Salah satu artikel jurnal yang menjadi kajian pustaka makalah ini adalah *Gender Equality Education in Japan: A Case Study of University EFL Teachers' Experiences and Perspectives* yang ditulis oleh Jessica Zoni Upton dan dapat ditemukan di *Nagoya JALT Journal Volume 3*, isu pertama . Di dalam artikel ini Jessica Zoni Upton melakukan penelitian terhadap kesetaraan gender dengan melakukan survei terhadap pengajar bahasa Inggris yang pada saat itu tengah mengajar di universitas Jepang. Jessica Zoni Upton memiliki banyak pertanyaan menarik terhadap peserta survei yang beliau tulis di dalam artikel jurnalnya. Dimana dalam salah satu pertanyaan dari surveinya tersebut bagaimana tingkat pengajaran mengenai kesetaraan gender di Jepang menurut peserta. Sebagian besar dari pengajar setuju bahwa tingkat pengajaran mengenai kesetaraan gender di Jepang masih tergolong tingkat terendah. Jessica Zoni Upton menyimpulkan dalam artikel jurnalnya ini bahwa kebanyakan dari peserta survei masih memandang negatif terhadap kondisi pengajaran kesetaraan gender. Beliau juga mendapat berbagai pendapat dan solusi dari peserta yang mengikuti survei ini.

Kemudian ada laporan yang dibuat atas kerjasama antara *Walter Leitner International Human Rights Clinic* dengan *Human Rights Now* yang memiliki judul *Gender Equality at Educational Institutions in Japan*. Isi laporan ini diawali penjelasan umum mengenai salah satu aturan di Amerika mengenai diskriminasi gender. Kemudian setelah itu laporan ini membandingkan isu kesetaraan gender di Jepang dan di Amerika dalam dalam bidang olahraga dan pendidikan. Laporan ini juga membahas mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual dalam pendidikan.

3. Pembahasan

3.1 Sejarah perkembangan kesetaraan gender di Jepang

Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Jepang dimulai pada zaman restorasi Meiji di tahun 1868 yang menandai adanya perubahan Jepang dari masyarakat feodal yang lama terisolasi dari dunia luar menjadi buah negara modern dibawah peranan monarki dari kaisar Meiji. Reformasi pendidikan pertama di Jepang modern ditandai dengan adanya restorasi Meiji. Adanya reformasi tersebut merupakan sebuah pencerahan peradaban atau dapat disebut

Bunmei Kaika. Pendidikan dianggap sebagai salah satu elemen kunci dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh dunia barat. Ini karena pendidikan memberikan landasan penting untuk pengembangan militer dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi sumber daya yang berharga di dunia modern yang kompetitif. Pemikiran ini didasarkan pada gagasan kesetaraan manusia yang bertujuan untuk menghancurkan hierarki yang ada di antara kelas sosial, termasuk militer, petani, pengrajin, dan pedagang. Konsep penting dari periode Bunmei Kaika (periode modernisasi Jepang) adalah upaya untuk menciptakan kesetaraan dalam masyarakat, baik di kelas gender maupun sosial. Selama masa ini, ada upaya serius untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan pendidikan kepada semua tingkat masyarakat, termasuk wanita, yang sebelumnya dianggap tidak memerlukan pendidikan.

Dalam pemikiran ini, Bunmei Kaika membangkitkan kesadaran bahwa kesetaraan gender adalah elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju. Tradisi lama yang mempertimbangkan pendidikan tidak diperlukan bagi perempuan untuk diubah, dan upaya dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan tersedia untuk semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Ini adalah langkah penting menuju pemberian hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam masyarakat Jepang (Hara, 1995 : 95).

Pada tahun 1871, Kementerian Pendidikan didirikan dan tahun berikutnya, *The Fundamental Code of Education* diumumkan. Undang-undang ini menetapkan wajib belajar selama 4 tahun untuk semua individu, tanpa memandang gender atau status sosial. Selain itu, pemerintah merencanakan mendirikan 53.760 sekolah dasar, 256 sekolah menengah, dan 8 universitas. Namun pada tahun 1882, tingkat kehadiran siswa perempuan di sekolah hanya mencapai setengah dari jumlah siswa laki-laki. Hal ini mencerminkan pemikiran bahwa wanita tidak perlu belajar atau memiliki kemampuan membaca masih tetap berakar pada saat itu. Pada masa itu, peran utama yang dianggap sesuai untuk wanita adalah mengasuh anak. Pendapat ini muncul karena pemikiran bahwa jika wanita mendapatkan pendidikan, mereka akan mampu berpikir secara independen, yang dianggap dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Akibatnya, kaum

wanita tidak mendapat dukungan untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan berpikir kritis (Hara, 1995: 96).

Pada awal zaman Meiji, ribuan pria Jepang dikirim ke luar negeri, terutama ke Eropa dan Amerika Serikat, untuk mengejar pendidikan lanjutan. Mereka belajar berbagai pengetahuan dan keterampilan yang kemudian diharapkan mereka bawa pulang ke Jepang untuk memajukan negara mereka. Pada tahun 1871, di antara 95 orang yang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa, terdapat lima siswi. Salah satu di antaranya adalah Tsuda Umeko, yang kelak menjadi pendiri sebuah akademi untuk wanita. Proses perjalanan ini melibatkan masa belajar selama 10 tahun yang mencakup biaya perjalanan, biaya sekolah, biaya hidup, dan pengeluaran insidental yang seluruhnya ditanggung. Setelah tinggal selama lebih dari 10 tahun di Amerika Serikat bersama keluarga Amerika, Tsuda mendirikan sebuah akademi wanita di Tokyo pada tahun 1900, yang kemudian dikenal sebagai *Women's English College* dan kemudian menjadi *Tsuda College*. Meskipun akademi ini tidak memiliki misi penyebaran agama, ia berbasis pada ajaran agama Kristen dan mengutamakan nilai-nilai yang terdapat dalam kitab Injil. Visi yang dipegang oleh Tsuda sangat tinggi dan idealis. Ia bertujuan untuk mempersiapkan wanita Jepang dengan kualitas profesional, pendidikan yang baik, dan kepribadian yang kuat. Melalui Tsuda Umeko, pengaruh Barat diperkenalkan ke Jepang melalui pendidikan tinggi untuk wanita, membuka jalan bagi perubahan dan kemajuan dalam peran dan akses wanita di masyarakat Jepang (Hara: 1995: 98).

Perkembangan sektor ekonomi dalam industri berdampak pada peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja wanita. Mereka tidak hanya dibutuhkan sebagai pekerja pabrik, tetapi juga sebagai operator telepon, karyawan kantor, guru, dan resepsionis. Hal ini akhirnya mendorong peningkatan akses pendidikan bagi wanita. Pada tahun 1900, undang-undang mengenai sekolah menengah atas untuk wanita diberlakukan. Undang-undang ini mengatur pendirian setidaknya satu sekolah menengah atas khusus wanita di setiap prefektur. Tindakan ini mencerminkan kesadaran masyarakat dan pemerintah Jepang akan pentingnya memberikan pendidikan yang setara dan kesempatan yang lebih besar bagi wanita untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Seiring berjalannya waktu, jumlah sekolah khusus wanita di Jepang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 1912, terdapat 156 sekolah negeri dan 53 sekolah swasta, dan angka ini meningkat menjadi 487 sekolah negeri dan 176 sekolah swasta pada tahun 1926. Prinsip utama di balik pendirian sekolah menengah untuk wanita adalah melatih mereka dalam peran tradisional sebagai ibu rumah tangga, sambil juga menanamkan nilai-nilai feminin. Pada tahun 1900, setelah pendirian akademi pertama untuk wanita oleh Tsuda Umeko, berdiri sekolah kedokteran wanita di Tokyo, dan tahun berikutnya diikuti dengan pendirian sekolah seni dan *Japan Women's University*. Pada tahun 1937, terdapat 42 akademi swasta untuk wanita yang menyediakan pendidikan selama 3 tahun. Mayoritas institusi ini berlokasi di kota-kota besar seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka, sehingga wanita yang tinggal di daerah pedesaan masih menghadapi kesulitan dalam akses pendidikan (Hara: 1995: 99). Hal ini mencerminkan evolusi sistem pendidikan wanita di Jepang selama periode tersebut, dengan peningkatan jumlah sekolah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan wanita dalam masyarakat yang semakin beragam.

Saat dimulainya Perang Dunia II pada bulan Desember 1941, aktivitas pendidikan di Jepang mengalami pembatasan dan penundaan. Hal ini terjadi seiring dengan perang yang mengharuskan banyak pria untuk berangkat ke medan pertempuran. Dalam situasi ini, hampir tiga juta wanita dimobilisasi untuk menggantikan peran yang sebelumnya dijalani oleh pria-pria ini dalam berbagai sektor publik. Selain itu, sekitar setengah juta wanita bekerja di sektor pertanian untuk menggantikan peran ayah, suami, saudara laki-laki, dan anak laki-laki mereka yang terlibat dalam perang. Peran wanita dalam mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh mobilitas massal pria menjadi sangat signifikan selama periode perang ini. Wanita Jepang berkontribusi secara besar-besaran dalam upaya perang dengan mengambil alih banyak peran yang sebelumnya dianggap sebagai peran laki-laki. Meskipun aktivitas pendidikan terhenti sementara, wanita Jepang menjadi tulang punggung dalam menjaga perekonomian dan mendukung upaya perang negara mereka.

Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat mengirimkan misi pendidikan ke Jepang. Misi ini bertujuan untuk

membebaskan sistem pendidikan Jepang dari pengaruh militeristik dan ultranasionalistik yang telah mendominasi selama masa perang. Selain itu, para misionaris ini mempromosikan prinsip desentralisasi dan demokrasi dalam pendidikan, dan mereka memiliki tekad untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam sistem pendidikan. Sejalan dengan rekomendasi dari misi pendidikan ini, konsep kesetaraan dalam kesempatan pendidikan untuk wanita mulai diakui secara resmi dalam konstitusi Jepang yang baru pada tahun 1946. Setahun setelahnya, hukum dasar untuk pendidikan ditetapkan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa wanita di Jepang memiliki akses yang setara dan kesempatan yang adil dalam sistem pendidikan mereka, yang pada gilirannya membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan kesetaraan gender yang lebih besar.

Pasal 26 dalam hukum dasar pendidikan Jepang mengatur hak dasar bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menerima pendidikan, dan menetapkan kewajiban bagi orang dewasa untuk memastikan bahwa anak-anak ini menerima pendidikan yang sesuai. Selanjutnya, hukum dasar pendidikan menguraikan lebih lanjut prinsip ini dan menjamin pendidikan wajib selama sembilan tahun yang gratis bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa anak perempuan memiliki hak yang setara untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan tinggi di institusi yang sama dengan anak laki-laki, mengakhiri diskriminasi gender dalam akses pendidikan. Ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan Jepang terhadap pendidikan yang lebih inklusif dan kesetaraan gender.

Kebijakan pendidikan setelah Perang Dunia II di Jepang menandai perubahan signifikan dalam pandangan terhadap peran wanita dalam masyarakat. Berbeda dengan kebijakan pendidikan sebelumnya yang menekankan ideologi "*Ryousai Kenbo*" (istri yang baik dan ibu yang bijaksana), pendekatan pasca-perang menitikberatkan pada pengembangan potensi individu wanita. Wanita diarahkan untuk menjadi warga negara yang berdaya guna dan berkontribusi aktif terhadap masyarakat.

Di tahun 1990-an, banyak orang Jepang merasa puas karena mereka merasa bahwa kesetaraan kesempatan dalam pendidikan bagi perempuan telah

sepenuhnya tercapai. Laporan "Japanese Women Today" yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri menjelaskan upaya untuk meningkatkan status perempuan Jepang dengan menyatakan bahwa Jepang perlu menghapus konsep stereotip mengenai peran gender yang masih tradisional dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penuh perempuan dalam masyarakat (Hara, 1995: 102-105).

3.2 Ketidaksetaraan gender pada dunia pendidikan Jepang

Ketidaksetaraan gender sering terjadi dalam aspek pendidikan yang merugikan perempuan. hal ini menjadi kan perempuan bahan perbandingan aspek berbagai bidang oleh laki laki. ketidaksetaraan gender masih bisa kita lihat di beberapa negara maju hingga sekarang. dan memunculkan asumsi bahwa wanita hanya mampu menjadi sosok ibu. Pola ketidaksetaraan gender di masyarakat berkembang cukup banyak secara signifikan. seperti salah satu negara dengan teknologi industri yang maju yaitu jepang masih menempatkan diri di peringkat tertinggi di dunia dalam kasus ketidaksetaraan gender.

Jepang merupakan negara maju yang terletak di benua Asia dan mempunyai kemajuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Jepang sangatlah pekerja keras dan sangat menghargai waktu. Dalam bidang pendidikan, negara Jepang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik karena pendidikan dasar di Jepang dapat menyempurnakan karakter mulai dari usia dini. Tak heran bila Jepang mampu melahirkan banyak orang-orang hebat karena telah menempuh pendidikan dengan baik.

Pendidikan di Jepang bersifat wajib hanya selama sembilan tahun yang meliputi sekolah dasar (enam tahun), sekolah menengah pertama (tiga tahun). Sebanyak 97 persen dari mereka melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas (tiga tahun) dan perguruan tinggi (empat tahun). Baik laki-laki maupun perempuan mendambakan untuk memperoleh karir yang baik dengan menempuh pendidikan tinggi. Namun, pada tahun tahun 2017 *World Economy Forum* telah merilis *The Global Gender Gap Report* yang menyatakan bahwa negara Jepang mendapatkan peringkat 114 dalam indeks global kesenjangan gender dari 140 negara. Kesenjangan gender (ketidaksetaraan gender) inipun terjadi dalam dunia

pendidikan, salah satunya yakni fenomena kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak universitas terhadap nilai mahasiswi perempuan Jepang.

Kasus manipulasi skor ini terjadi dan mulai terbongkar pada awal Agustus 2018 oleh beberapa media di Jepang salah satunya Koran Yomiuri. Dalam Koran tersebut mereka menemukan bahwa Tokyo Medical University telah terbukti mengurangi skor tes dari para pelamar di ujian fase pertama sebanyak 20 persen, kemudian menambah sebanyak 20 poin untuk pelamar laki-laki. Diketahui bahwa alasan universitas melakukan hal tersebut agar jumlah mahasiswa perempuan bisa ditekan sesedikit mungkin. Selain itu juga beredar rumor bahwa universitas sengaja membuat pelajar perempuan gagal agar mereka bisa membatasi pelajar perempuan dan memastikan lebih banyak dokter laki-laki saja.

Kecurangan ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2006 yang mana terjadi problem calon mahasiswa yang terlalu banyak perempuan. Hal ini juga didukung oleh kekhawatiran pihak universitas yang mengklaim bahwa dibandingkan dengan laki-laki, perempuan akan meninggalkan pekerjaannya setelah mereka sudah bersuami dan beranak. Kekhawatiran ini semakin terguncang ketika tahun 2010 jumlah pelamar yang berhasil lolos mencapai 38 persen perempuan. Dimasa inilah manipulasi skor tes akhirnya mulai dijalankan dan berhasil.

Setelah melalui berbagai penyelidikan, Manipulasi ini kemudian terungkap atas dugaan adanya “pintu belakang” seorang anak dari birokrat pendidikan kementerian (Futoshi Sano) agar masuk universitas dengan menawarkan imbalan bantuan untuk universitas dalam memperoleh dana penelitian. Sumber lain juga mengatakan adanya bentuk penyuapan sebesar 35 yen dalam bentuk subsidi pemerintah yang akan diberikan pada universitas. Melalui kasus tersebut telah mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi di Jepang dalam dunia pendidikan dengan mendiskriminasi perempuan di Jepang.

Pengurangan nilai yang dilakukan oleh pihak universitas dilakukan agar mampu mengurangi jumlah mahasiswi yang melamar. hal ini dianggap bahwa ada perasaan kuat dari universitas yang beranggapan bahwa dokter pria lah yang mendukung layanan medis di rumah sakitnya dibandingkan perempuan. namun kenyataannya secara umum bahwa pelamar wanita lah yang lebih kompeten

dibandingkan pelamar lelaki. Memanipulasi nilai tersebut kurang diketahui oleh para petugas rumah sakit setempat. Pihak dari pejabat ujian masuk pendidikan, kebudayaan, olahraga dan teknologi Jepang menanggapi hal tersebut dengan mengatakan “ metode penyaringan mahasiswa baru harus dilakukan sesuai dengan buku panduan pendaftaran ujian, tidak baik jika hasil ujian dimanipulasi secara suka tanpa memberitahu kepada pihak terkait “ karena pemberitaan yang ramai akan ketidaksetaraan dalam melakukan ujian masuk ke kedokteran menjadikan sebagian wanita Jepang harus memupuskan harapannya menjadi dokter. Bukan hanya di Tokyo kemungkinan di sejumlah kampus yang ada di Jepang memberlakukan hal yang sama terhadap wanita

Ketidaksetaraan gender dan diskriminasi perempuan tersebut terjadi karena adanya pandangan masyarakat Jepang yang masih menganut budaya patriarki. Budaya patriarki ini didefinisikan sebagai sistem laki-laki yang lebih berkuasa dalam menentukan segala sesuatu. Masyarakat yang masih terpaku dengan budaya patriarki menganggap perempuan lemah dan berada dibawah laki-laki. Dalam kasus tersebut menyebabkan adanya pandangan masyarakat bahwa laki-laki lebih pantas untuk menjadi seorang dokter daripada perempuan karena perempuan dinilai tidak akan bisa bekerja dengan baik karena harus mengurus kehidupan rumah tangga dan anaknya kelak. Karena itulah terjadi kasus manipulasi skor ujian bagi pelajar perempuan di Jepang.

Sama halnya dengan kasus kecurangan bagi pelajar perempuan pada skor tes masuk perguruan tinggi kedokteran di Jepang. Dalam kasus ini masih terdapat pandangan patriarki dalam masyarakat Jepang yang didukung oleh kekhawatiran dari pihak universitas yang menganggap bahwa perempuan jika sudah menikah nantinya tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai dokter dengan maksimal. Alhasil mereka melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi skor tes bagi perempuan.

Sampai saat ini pendidikan bagi perempuan di Jepang masih mengalami ketimpangan gender dikarenakan pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan untuk laki laki merupakan sarana hal yang utama. Spekulasi itu muncul saat masih di zaman Meiji. Mengenai peran wanita yaitu hanya melahirkan dan mengurus keluarga di rumah. serta banyak hal yang beranggapan jika wanita

sudah menikah ia akan menjadi seorang istri dan mengurus keluarga tanpa memikirkan cita cita dan pekerjaan sebelumnya

3.3 Dinamika Kesetaraan Gender dari Masa ke Masa dalam Dunia Pendidikan di Jepang

1. Masa Meiji

Perempuan pada masa Meiji dianggap kurang berguna dikarenakan fisiknya yang dianggap tidak cukup kuat untuk terjun ke dalam peperangan, akhirnya terdorong keluar dari struktur feodalisme hingga perempuan hanya dianggap sebagai peran tambahan untuk pria. Begitupun dalam pendidikan perempuan juga mendapatkan perlakuan diskriminasi. Hanya perempuan dengan status sosial tinggi yang dapat mengenyam pendidikan. Sedangkan untuk perempuan kelas lebih diprioritaskan untuk membantu orang tua dan suami di rumah tangga.

Meski demikian akses pendidikan yang diterima oleh perempuan yang mendapat pendidikan tidak sama dengan laki-laki. Pendidikan mereka tetap saja diprioritaskan untuk untuk kepentingan rumah tangga, mengabdikan pada suami, memasak dan lain sebagainya. Pendidikan mereka ini ditujukan agar si perempuan siap untuk dinikahi oleh para pejabat laki-laki Jepang. Untuk itu maka ada sekolah perempuan khusus untuk pendidikan sebelum menjadi istri pada masa Meiji. Kemudian untuk wanita hanya dapat meneruskan ke sekolah khusus (3 atau 4 tahun), sedikit sekali yang dapat melanjutkan ke universitas. Bagi anak laki-laki diberikan kesempatan memilih 3 sekolah, yaitu sekolah khusus (3 atau 4 tahun), universitas (5 tahun) atau sekolah menengah (3 tahun) kemudian ke universitas (3 tahun) (Hartono, 2007).

Oleh karena standar kurikulum pendidikan perempuan lebih diarahkan pada rumah tangga yang berbeda dengan laki-laki karena orientasi mereka adalah fungsi praktis. Maka sistem pemerintahan di Jepang lebih utama diisi oleh para laki-laki. Sementara perempuan adalah bagian dari tim suksesnya seorang laki-laki di dalam rumah tangga.

2. Periode Pendidikan Modern

Pada periode pendidikan modern diskriminasi di Jepang masih sangat kental. Laki-laki tetap menjadi prioritas untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan perempuan. Meski bila dilihat dalam hal kemampuan posisi perempuan bisa mengimbangi laki-laki. Namun kecurangan masih terus dapat dilakukan dan prioritas untuk laki-laki tetap dikedepankan.

Seperti kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak universitas untuk menekan angka diterimanya perempuan sebagai peserta didik baru seperti yang terjadi di Universitas Medis 360 Tokyo mencerminkan masih adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nilai untuk para siswa perempuan dibuatkan dalam standar yang lebih tinggi dari pada laki-laki. Hal ini untuk meminimalisir jumlah dokter perempuan dan meningkatkan jumlah dokter laki-laki.

Faktor lainnya yang mendukung ketidaksetaraan yang terjadi adalah banyak perempuan yang oleh keluarganya tidak diizinkan untuk merantau ke kota karena perempuan diharuskan kembali ke daerah asal mereka dan mencari pendamping hidup, dan diekspektasikan untuk membantu mengurus keluarga mereka. Representasi perempuan sangatlah sedikit dalam bidang STEM. Contohnya, pada tahun 2013, peserta didik perempuan dalam ilmu teknik hanya berjumlah 3.9% dan sains sebesar 1.6% dibanding dengan bidang kemanusiaan/seni sebesar 66.1% dan ilmu sosial sebesar 36.8%. Muramatsu dalam Yoshikawa, et al., (2018) menjelaskan, kurangnya peminatan perempuan dalam bidang STEM dapat dilihat sejak tingkat pendidikan kedua (secondary education) serta pengaruh perilaku orang dewasa di sekitar anak perempuan yang menganggap bahwa bidang STEM hanya untuk laki-laki dibanding untuk perempuan (Sari, 2020).

4. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, ketidaksetaraan gender pada dunia pendidikan Jepang masih begitu terasa. Banyaknya kasus mulai dari kecurangan pihak universitas pada nilai mahasiswi Jepang. Ketidaksetaraan gender juga diakibatkan budaya patriarki yang masih ada hingga saat

ini. Adanya pandangan bahwasannya laki-laki lebih tinggi dari perempuan karena anggapan tentang perempuan lebih baik mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketimbang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam kasus ini budaya patriarki di masyarakat menjadikan adanya batasan bagi perempuan dalam pendidikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya untuk mengubah cara orang di Indonesia dan Jepang melihat masalah gender. Mereka harus belajar menghargai dan mengakui bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dalam berbagai hal, terutama dalam hal pendidikan. Dalam bidang pendidikan, perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender, sebagian besar berasal dari pemikiran yang ortodok dan parsial. Sebagian besar masyarakat kita percaya bahwa wanita hanya dapat mengurus rumah karena pemahaman patriarki yang kuat bahwa mereka hanya dapat mengurus rumah. Akibatnya, banyak wanita tidak mau pergi ke sekolah tingkat atas.

5. Referensi

Adnyani, K. E. K. (2020). *Bahasa Jepang dan Gender: Sebuah Pengantar*. Nilacakra.

Baker, D. (1998). *Equity Issues in Science Education. International handbook of science education*. 10.1007/978-94-6300-497-8_6

Buchman C, Thomas D, Anne M, (2007) “*Gender inequalities in education*”, University ohio, south africa

Hartono, M. (2007). Wanita Jepang Dalam Perspektif Historis. *MOZAIK*, 2(1).

Maria Rita H, (2018), Artikel “*Terbongkar, Universitas Kedokteran Tokyo Diskriminasi Wanita*”, Dunia Tempo, Link : <https://dunia.tempo.co/read/1113608/terbongkar-universitas-kedokteran-tokyo-diskriminasi-wanita>

Sari,A.Y.,Pattipeilohy,S.C.H.(2020). “*Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang*”. *Journal of International Relations*, 6(2), 358-367.

Yumoto, F. (2004). 理科実験における学習者の相互行為の実態と変容に関する研究. *埋科教育学研究*, 44(2), 83-94.

<https://doi.org/10.11639/sjst.KJ00005018051>